

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Dinas Sosial ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan serta sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, 2022
Kepala Dinas Sosial
Kota Tebing Tinggi

Drs. KHAIRIL ANWAR,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650523 199303 1 006

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kota Kota Tebing Tinggi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran, pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif dalam bentuk Program Kegiatan dengan Tolak Ukur untuk mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja. Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

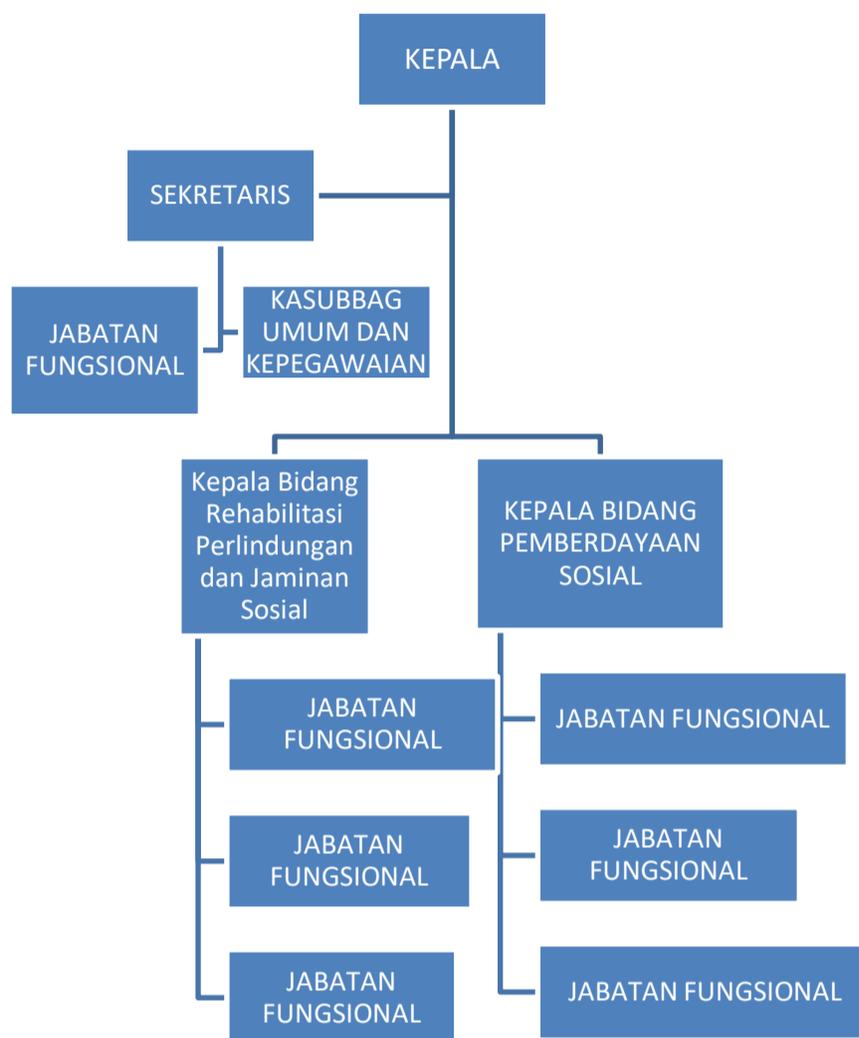
1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membuat seluruh pemerintah daerah pada umumnya dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada khususnya memasuki babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebelumnya Dinas Sosial tergabung dengan Dinas Ketenagakerjaan yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja namun pada tahun 2017 terjadi perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sehingga terbentuklah Dinas Sosial. Dengan adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini maka Dinas Sosial telah memiliki satu dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan dengan ketentuan hukum dalam rangka melaksanakan kebijakan dan rencana-rencana strategis dalam pembangunannya.

Dinas Sosial dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan pada Eselon II.A dan membawahi Sekretaris berkedudukan sebagai Eselon IIIA dan 2 Kepala Bidang yang berkedudukan sebagai Eselon IIIB yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial



TATA KERJA DAN KEADAAN PEGAWAI

Sebagai satuan kerja Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas yaitu melakukan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial terutama dari segi ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial . Satuan Kerja ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses Pemerintahan, terutama dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Dinas Sosial melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keadaan Pegawai pada Dinas Sosial dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Kepala Dinas Membawahkan:

- a. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan /Jabatan Fungsional
- b. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosisl, membawahkan
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial /Jabatan Fungsional
 2. Seksi Perlindungan Sosial / Jabatan Fungsional
 3. Seksi Jaminan Sosial.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan,
 1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ Jabatan Fungsional
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/ Jabatan Fungsional
 3. Seksi Kepahlawan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial /Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, ada beberapa penyelenggaraan sosial sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2009 yang dipedomani oleh Dinas Sosial . Penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial. Namun dalam penyelenggaraannya perlu melakukan pendataan terlebih dahulu agar pelaksanaannya tepat sasaran dan merata. Dan tentunya hal ini didukung oleh Program dan Kegiatan Dinas Sosial beserta anggaran yang dibutuhkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Sosial ,Prioritas pembangunan diarahkan pada upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan terutama untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang dilakukan secara berkesinambungan. Maka dari itu perlu ditetapkan strategi , tujuan dan sasaran

dengan mempedomani kebijakansebagai petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan.

Aspek Strategis Organisasi Meliputi :

- a. Mendorong kemandirian PMKS agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga. Meningkatkan fasilitasi perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal di sini adalah kebijakan dari Dinas Sosial atau pemerintah kota Tebing Tinggi yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan sosial.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait, adapun permasalahan utama pada Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk bidang Sosial.
2. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur terutama aparatur fungsional di bidang Sosial.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
4. Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan
6. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
7. Belum Optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
8. Data yang masih belum akurat sehingga pemanfaatannya dalam sinergitas antar instansi menjadi susah untuk dilakukan

1.4 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, adalah sebagai berikut :

1. INPRES No.7 tahun 1999 (LAN untuk perencanaan, BPKP untuk evaluasi) tentang LAKIP
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN, azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil. Penerapan Anggaran berbasis prestasi kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah..
5. PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja da Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi dan Tata Kerja,Aspek Strategis serta permasalahan utama, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan perjanjian kinerja Tahun 2022. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Strategi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi.

Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Tebing Tinggi menjadi pedoman penyusunan program kerja SKPD dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang berkembang kian kompleks seiring berkembangnya kehidupan masyarakat.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, disusun suatu rencana kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang berhasil di Kota Tebing Tinggi maka diperlukan visi dan misi (jangka menengah) yang jelas agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (jangka pendek).

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Bertitik tolak pada visi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, yaitu “***Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas***”.

Maka Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi berusaha mewujudkannya melalui misi walikota yaitu:

Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa

Mengacu pada visi tersebut maka misi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, yaitu :

1. Meningkatkan penanganan PMKS secara terpadu dan sistematis
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan masyarakat melalui kerjasama
3. Meningkatkan penyelenggaraan e-Government yang baik dan bersih dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Sasaran merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk : (a) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; (b) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (d) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (e) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (f) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: (a) perseorangan; (b) keluarga; (c) kelompok; dan/atau (d) masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial : a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2018	2019	2020	2022	2022
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup		Persentase PMKS yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%	80%	80%	80%	80%
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	80%	80%	80%	80%	80%

2.1.3 Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dengan strategi yang tepat. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok. Perencanaan Kinerja dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kepala SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 dengan Walikota Tebing Tinggi yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Dalam Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Di pertengahan tahun, berdasarkan hasil dari evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi, dikatakan bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 perlu penyempurnaan dan penyesuaian. Maka dari itu ditetapkan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/1167 Tahun 2022 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2022. Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mengeluarkan Keputusan penetapan Suplemen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2022 Nomor 050/72 Tahun 2022. Perencanaan Kinerja SKPD Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan perubahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target	
				Tahun 2022	
1	2	5		8	
1. Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS yang ditangani			
		Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	%	95	
		persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	%	100	
		jumlah penyampaian laporan tepat waktu	dokumen	27	
		persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	
		penyediaan gaji dan tunjangan	bulan	12	
		Terlaksananya proses administrasi barang milik daerah dengan baik dan akuntabel	%	100	
		jumlah unit jaminan barang milik daerah	unit	5	
		Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah dengan baik	%	100	
		jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	jenis	16	
		jumlah makanan dan minuman	kotak	2.520	
		jumlah barang untuk kebersihan kantor	buah	300	
		jumlah jenis alat tulis kantor	jenis	60	
		jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis	10	

jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	240
jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	kali	200
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Daerah	80
	%	
jumlah unit pengadaan peralatan	unit	10
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80
jumlah penyelenggaraan tugas surat menyurat	surat	3.600
jumlah jaringan komunikasi, air dan listrik kantor	Jaringan	9
jumlah penyedia jasa kebersihan kantor	orang	2
jumlah penyedia jasa pelayanan kantor	orang	14
jumlah penyedia jasa keamanan kantor	orang	1
Barang milik daerah terpelihara dengan baik	%	80
jumlah kendaraan yang dipelihara	unit	7
jumlah peralatan yang dipelihara	unit	453
luas gedung yang di pelihara	m2	812,5
jumlah unit rehabilitasi sedang gedung	unit	2
Persentase kelompok/lembaga/organisasi yang diberdayakan	%	100
Jumlah diberdayakan	PSKS yang PSKS	5
jumlah PSM yang diberdayakan	orang	41
TKSK yang diberdayakan	orang	5
jumlah PSKS lainnya yang diberdayakan	orang	7
jumlah WKSMB yang diberdayakan		41
Karang Taruna yang diberdayakan	orang	41

jumlah PSKS yang mengikuti bimbingan teknis kesejahteraan sosial	orang	12
LK3 yang diberi fasilitasi pelaksanaan HKS	LK3 kali	2 1
Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	80
Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	80
jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan permakanan	orang	100
jumlah penyandang cacat (disabilitas) yang mendapat bantuan sosial	orang	342
Persentase Rehabilitasi PMKS Lainnya	%	80
jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial	KK	12.700
Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	panti	3
jumlah orang terlantar yang dibantu	orang	120
Persentase masyarakat yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	%	100
Persentase anak yang ditangani	%	
jumlah anak terlantar/anak keluarga miskin yang dibantu	orang	1.540
Persentase validasi data	%	100
jumlah dokumen PMKS dan PSKS	dokumen	2
jumlah dokumen PMKS dan PSKS	dokumen	2
jumlah pendamping PKH yang diberikan fasilitas	orang	23
jumlah PMKS yang dilatih	orang	100
jumlah keluarga miskin yang dilatih		0

	jumlah pendamping KUBE	orang	80
	Persentase korban bencana yang di tangani	%	100
	Persentase korban bencana yang menerima perlindungan sosial	%	100
	jumlah korban bencana yang diberikan bantuan langsung berupa sandang, pangan dan papan	jiwa	34.975
	Jumlah masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaam bencana	orang	6
	pembentukan kampung siaga bencana	Titik	5
	TAGANA yang diberdayakan	orang	33
	Taman makam pahlawan sesuai standart	%	60
	Taman makam pahlawan sesuai standart	%	60
	terpeliharanya taman makam pahlawan	unit	1
	terpeliharanya taman makam pahlawan	unit	1
	terpeliharanya taman makam pahlawan	orang	1

Tabel 3. Perjanjian Kinerja 2022

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS Yang Ditangani	%	80

Tabel 4. Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target		Anggaran
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah penyampaian laporan tepat waktu	27	dok	Rp 19.924.000,00
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12	bulan	Rp 2.406.263.000,00
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
s 7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah unit jaminan barang milik daerah	6	unit	Rp 44.768.190,00
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	20	Jenis	Rp 10.978.700,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman	3360	kotak/bungkus	Rp 190.029.700,00
11		jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28	Jenis	
12		jumlah jenis alat tulis kantor	71	Jenis	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4	Jenis	Rp 13.282 .800,00
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	240	dokumen	Rp. 3.978.000,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	150	Kali	Rp 178.677.000,00
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit pengadaan kendaraan			
	Pengadaan Mebel		2	unit	Rp. 21.683.700,00
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit pengadaan peralatan	7	Unit	Rp 22.304.300,00
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit pembangunan bangunan	0	Unit	0
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyelenggaraan tugas jasa surat menyurat	3600	SURAT	Rp 54.121.000,00
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah REKENING komunikasi, air dan listrik yang aktif	6	REKENING	Rp 132.040.000,00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyedia jasa kebersihan kantor	2	ORG	Rp 307.556.400,00
		jumlah penyedia jasa pelayanan kantor	14	ORG	
		jumlah penyedia jasa keamanan kantor	1	ORG	
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang di pelihara	9	unit	Rp 239.448.000,00
26	Pemeliharaan Mebel				
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan yang dipelihara	80	unit	Rp 62.030.600,00
28	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
29	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung yang di pelihara	0	m2	-
		jumlah unit rehabilitasi sedang gedung	0	unit	-
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
32	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
33	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah PSM yang diberdayakan			

LKIP DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI 2022

34	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	TKSK yang diberdayakan	5	orang	Rp 18.000.000,00
35	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah keluarga miskin yang dilatih	0	kk	Rp 3.600.000,00
		jumlah PSKS lainnya yang diberdayakan	1	orang	
		jumlah pendamping KUBE	0	PENDAMPING	
36	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah PSKS lainnya yang diberdayakan	1	PSKS	Rp 200.000.000,00
		jumlah WKSMB yang diberdayakan	0	WKSMB	
		Karang Taruna yang diberdayakan	63	pengurus	
		jumlah PSKS yang mengikuti bimbingan teknis kesejahteraan social	0	PSKS	
37	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	LK3 yang diberi fasilitasi	0	LK3	-
	-	pelaksanaan HKS	1	KEG	
38	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
39	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
40	Penyediaan Permakanan	jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan permakanan	45	Orang	Rp 86.724.000,00
41	Penyediaan Sandang				
42	Penyediaan Alat Bantu	jumlah penyandang cacat (disabilitas) yang mendapat bantuan social	40	ORG	Rp 71.244.500,00
43	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		17	ORG	Rp. 39.987.000,00
44	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				

45	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
46	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
47	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
48	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				
49	Pemberian Layanan Kedaruratan				
50	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				
51	Pemberian Layanan Rujukan				
52	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
53	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				
54	Pemberian Layanan Kedaruratan				
	Penyediaan Permakanan	jumlah PMKS yang mendapat bantuan social	1351	KK	Rp 648.150.300,00
		Jumlah panti yang difasilitasi	3	Panti	
55	Penyediaan Sandang				
56	Penyediaan Alat Bantu				
57	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				
58	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				
59	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				
60	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				

61	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
62	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				
63	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang terlantar yang dibantu	20	ORANG	Rp 25.461.000
64	Pemberian Layanan Rujukan				
65	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				
66	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
67	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
68	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	jumlah anak terlantar/ anak keluarga miskin yang dibantu	0	ORANG	-
69	Rujukan Anak-Anak Terlantar				
70	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				
71	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
72	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen PMKS dan PSKS	5	DOKUMEN	Rp 575.645.500,00
73	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 420.40.000,00
74	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah pendamping PKH yang diberikan fasilitas	25	ORG	Rp. 1.938.404.880,00
			8400 KK		
75	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah PMKS yang diberdayakan	0	kelompok	-
77	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
78	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
79	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang diberikan bantuan langsung berupa sandang, pangan dan papan	1.362	JIWA	Rp 196.764.100,00
80	Penyediaan Sandang				
81	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				
82	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				
83	Pelayanan Dukungan Psikososial				

84	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
85	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	pembentukan kampung siaga bencana			
86	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	TAGANA yang diberdayakan	33	ORANG	Rp 119,480.000,00
87	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
88	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
89	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpeliharanya taman makam pahlawan			
90	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1	UNIT	Rp 61.410.260,00
91	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp 16.800.000
					Rp7.708.535.930,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra SKPD.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator KInerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS yang telah Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	80%	Rp. 6.208.230.053,00	100%		Dinas Sosial

Untuk mencapai PMKS yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, Dinas Sosial Kota Tebing melakukan pemberian bantuan berupa Barang yang diserahkan kepada Masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut dilakukan melalui program rehabilitasi ,perlindungan dan jaminan sosial

Beda dengan tahun sebelumnya bahwa data PMKS di kota Tebing Tinggi sudah mulai dibenahi dan mulai terukur walaupun sebagian belum dilakukan verivikasi dan validasi. Namun ada beberapa bentuk bantuan sosial dimana datanya sudah terukur yang terdiri dari:

- a. Bantuan pangan berupa beras yang bersumber dari APBD kota Tebing Tinggi. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan target s adalah 1126 kk untuk beras madani, dan untuk bantuan inflasi 8400 KK. Berdasarkan realisasi bahwa Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mampu memberikan bantuan sosial berupa pangan (beras) kepada 1126 kk (bantuan beras madani) dan 8400 kk (bantuan inflasi) yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga mencapai kinerja 100% berdasarkan kemampuan APBD.
- b. Rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis (*data terlampir*) telah diberikan paket permakanaan 45 orang, alat bantu 20 orang, Rujukan ke panti dan direunifikasi dengan keluarga yang bersumber dari APBD 2022.
- c. Bantuan Logistik /sembaku selama tanggap darurat Bencana Alam , non alam, sosial kepada para korban bencana sebanyak 1362 KK.
- d. Program dari Kementrian sosial kerjasama dengan Dinas Sosial, berdasarkan DTKS tahun 2022 bahwa jumlah keluarga miskin kota Tebing Tinggi sebanyak 29.660 kk .Selain APBD, Dari Jumlah tersebut 10.999 kk sudah menerima bantuan sembako, 6.911 kk menerima bantuan PKH , dan 59.372 jiwa telah menerima bantuan jaminan sosial berupa PBI JKN yang bersumber dari APBN oleh Kementrian Sosial .

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS yang telah ditangani	80%	Rp. 5.096.547.277	100%	80%	Rp. 6.208.230.053,00	100%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 7. Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS yang telah Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	80%	125%

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan capaian Standart Nasional

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			Standart Nasionala 2022		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS yang telah ditangani	80%	Rp. 6.208.230.053,00	100%	NIHIL		

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.



Berdasarkan APBD, berikut tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan:

Tabel 9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS yang telah Terpenuhi Kebutuhannya	80%	100%	100%	Kegiatan hanya didukung dari sumber data yaitu DTKS	Dilakukan pendataan secara menyeluruh, baik yg sudah terdata maupun yang belum terdata dalam DTKS

Tabel 10. Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian		Menunjang /Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS	Persentase PMKS yang telah Terpenuhi Kebutuhannya	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				

				Daerah				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyampaian laporan tepat waktu	27	Dok	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah unit jaminan barang milik daerah	5	Unit	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	16	Jenis	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman	2520	kotak/bungkus	
					jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25	Jenis	Menunjang
					jumlah jenis alat tulis kantor	60	Jenis	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10	Jenis	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	240	Dokumen	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	150	Kali	Menunjang

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit pengadaan peralatan	10	Unit	Menunjang
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit pembangunan bangunan	0	Unit	Menunjang
				Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah				
				Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	jumlah penyelenggaraan tugas jasa surat menyurat	3600	SURAT	Menunjang
				Penyediaa n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah REKENING komunikasi, air dan listrik yang aktif	6	REKENI NG	Menunjang
				Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyedia jasa kebersihan kantor	2	ORG	Menunjang
					jumlah penyedia jasa pelayanan kantor	14	ORG	
					jumlah penyedia jasa keamanan kantor	1	ORG	
				Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah				
				Penyediaa n Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang di pelihara	9	Unit	Menunjang
				Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan yang dipelihara	80	Unit	Menunjang
				PROGRAM PEMBERD AYAAN SOSIAL				

				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota				
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	jumlah PSM yang diberdayakan	41	Pengurus	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	TKSK yang diberdayakan	5	Orang	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	jumlah keluarga miskin yang dilatih	0	Kk	Menunjang
					jumlah PSKS lainnya yang diberdayakan	1	Orang	
					jumlah pendamping KUBE	0	PENDAMPING	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	jumlah PSKS lainnya yang diberdayakan	1	PSKS	Menunjang
					jumlah WKSBM yang diberdayakan	0	WKSBM	
					Karang Taruna yang diberdayakan	63	Pengurus	
					jumlah PSKS yang mengikuti bimbingan teknis kesejahteraan sosial	0	PSKS	
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	LK3 yang diberi fasilitasi	0	LK3	
				-	pelaksanaan HKS	1	KEG	Menunjang
				PROGRAM REHABILITASI				

				SOSIAL				
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
				Penyediaan Permakanaan	jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan permakanaan	65	Orang	Menunjang
				Penyediaan Sandang				
				Penyediaan Alat Bantu	jumlah penyandang cacat (disabilitas) yang mendapat bantuan sosial	100	ORG	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				
				Pemberian Layanan Kedaruratan				
				Penyediaan Permakanaan	jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial	1500	KK	Menunjang
					Jumlah panti yang difasilitasi	3	Panti	Menunjang
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang terlantar yang dibantu	20	ORANG	Menunjang
				PROGRAM PERLINDU				

				NGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota				
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	jumlah dokumen PMKS dan PSKS	5	DOKUMEN	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota				Menunjang
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah pendamping PKH yang diberikan fasilitas	25	ORG	Menunjang
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah PMKS yang diberdayakan	0	Kelompok	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
Q				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota				
				Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang diberikan bantuan langsung berupa sandang, pangan dan papan	32.286	JIWA	Menunjang
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota				
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	pembentukan kampung siaga bencana	6	TITIK	Menunjang

				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	TAGANA yang diberdayakan	33	ORANG	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota				
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	terpeliharanya taman makam pahlawan	1	UNIT	Menunjang
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota				

Dari analisa di atas bahwa tingkat keberhasilan Dinas Sosial Tebing Tinggi dalam penanganan PMKS (dalam hal ini bersumber APBD) adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi PMKS hampir 100% walaupun belum mencapai hasil yang baik dan signifikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan Anggaran yang ada Dinas Sosial lebih memprioritaskan kepada penanganan PMKS berupa bantuan dan dari pada Penguatan Kapasitas PSKS. Kondisi PSKS di kota Tebing Tinggi cukup memadai sehingga Dinas Sosial hanya memberikan kontribusi untuk menunjang kegiatan mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk Ke depannya SDM bagi PSKS akan lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sebagai mitra kerja untuk mendorong penanggulangan PMKS.

Namun Dinas Sosial Tebing Tinggi menyadari bahwa tidak semua PMKS yang bisa ditampung. Selain dengan keterbatasan Anggaran, masih ada komponen PMKS yang memiliki data yang belum jelas dan tumpang tindih untuk sebagai pembanding capaian kinerja. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial lebih fokus kepada Data DTKS untuk mendukung program Kementerian Sosial sehingga secara keseluruhan penanganan PMKS khususnya di Kota Tebing Tinggi sebagian besar ditangani Kementerian Sosial. Maka dari itu Dinas Sosial akan berencana mendata kembali beberapa komponen PMKS yang belum dibenahi datanya, seperti penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Orang Terlantar, dan lain-lain untuk mendukung perencanaan yang bersumber dari APBD.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Tabel Anggaran 2022 Program/Kegiatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi ,dibandingkan dengan capaian indikator bahwa secara garis besar bahwa Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi memperoleh capaian kinerja hampir 100% dengan Biaya 83,21% dari Anggaran .

Tabel 11. Realisasi Anggaran

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI S.D BULAN INI	%
T O T A L		Rp 7.708.535.930	Rp 6.208.230.053	80,54
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 19.924.000,00	Rp 19.798.000	99,37
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.406.263.000,00	Rp 2.321.498.639	96,48
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.06.01.2.03.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 44.768.190,00	Rp 35.230.083	78,69
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.978.700,00	Rp 10.972.700	99,95
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 190.029.700,00	Rp 179.508.800	94,46
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 13.282.800,00	Rp 13.029.000	98,09
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.978.000,00	Rp 1.440.000	36,20
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 178.677.000,00	Rp 170.655.510	95,51
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp 21.683.700,00	Rp 21.041.000	97,04
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 22.304.300,00	Rp 21.528.000	96,52
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

LKIP DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI 2022

1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	54.121.000,00	Rp	53.973.000	99,73
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	132.040.000,00	Rp	96.057.774	72,75
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	307.556.400,00	Rp	283.502.240	92,18
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	239.448.000,00	Rp	136.516.507	57,01
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	62.030.600,00	Rp	47.116.000	75,96
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	-	Rp	-	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	18.000.000,00	Rp	18.000.000	100,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	3.600.000,00	Rp	3.600.000	100,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	200.000.000,00	Rp	99.995.600	50,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Rp	86.724.000,00	Rp	85.632.000	98,74
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Rp	71.244.500,00	Rp	67.570.000	94,84
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp	39.987.000,00	Rp	37.946.500	94,90
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti					

	Sosial					
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Perumahan	Rp	648.150.300,00	Rp	618.118.500	95,37
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	575.645.500,00	Rp	541.804.500	94,12
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	42.040.000,00	Rp	37.806.000	89,93
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp	1.938.404.880,00	Rp	1.037.773.200	53,54
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Rp	196.764.100,00	Rp	107.174.500	54,47
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp	119.480.000,00	Rp	89.714.000	75,09
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp	44.610.260,00	Rp	34.428.000	77,18
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp	16.800.000,00	Rp	16.800.000	100,00

7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan perhitungan Efisiensi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 dapat disajikan data efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sebagai Berikut:

Tabel 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 , tingkat efisiensi penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp.)	Capaian	
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Indikator : Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%	100%	125%	7.708.535.930,00	6.208.230.053,00	80,53%	35,57%

Berdasarkan tabel 11 di atas, Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan program kegiatan dengan pencapaian indikator rata-rata diatas 100% , terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yaitu indikator **Persentase PMKS yang telah Terpenuhi Kebutuhannya** . Hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya tidak terduga, seperti penanganan bencana dan orang terlantar dan juga dipengaruhi oleh kegiatan eksternal yaitu dari Kementrian Sosial dan Provinsi . Capaian Tingkat efisiensi ini bukan berarti bahwa anggaran yang tersedia untuk Dinas Sosial telah memenuhi Tujuan dan Sasaran baik di Dinas Sosial maupun di tingkat Pemerintah Kota hal ini dikarenakan Dinas Sosial hanya memprioritaskan beberapa jenis PMKS saja yang penanganannya tidak berpengaruh terhadap Makro.

**BAB IV
PENUTUP**

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengoordinasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, perencanaan strategis maupun langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan ada sinkronisasi antara rencana dengan pencapaian hasil kinerja yang telah dilaksanakan untuk melanjutkan program kerja ditahun mendatang, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan laporan kinerja yang akuntabel untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Dengan menyadari bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih terdapat kekurangan walaupun dengan usaha yang maksimal telah diupayakan untuk mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Tebing Tinggi, 2022
Kepala Dinas Sosial
Kota Tebing Tinggi

Drs. KHAIRIL ANWAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650523 199303 1 006